

JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
issn cetak :2354-9033 || issn online :2579-9398 || Vol. 7 No. 1 Tahun 2020
<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia>

PENANGANAN OVER KAPASITAS DI DALAM LAPAS

Jaka Arief Sugema
Politeknik Ilmu Pemasarakatan
e-mail : jakarief96@gmail.com

ABSTRAK

Overcrowded atau yang biasa disebut dengan over kapasitas pada mayoritas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia memerlukan perhatian serius dan harus ditangani dengan sungguh-sungguh karena seringkali menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks jika di diamkan terus menerus, contoh masalah yang dapat ditimbulkan antara lain masalah Kesehatan, tidak berjalannya program pembinaan dan yang paling parah adalah kerusakan didalam Lapas. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai dampak yang dapat ditimbulkan oleh over kapasitas dan solusi untuk mengatasi over kapasitas tersebut. Over kapasitas dapat mengakibatkan proses berjalannya program pembinaan menjadi sulit, rendahnya pemenuhan hak tahanan yang seharusnya di berikan oleh pihak Lapas, petugas yang tidak profesional serta bengkoknya anggaran yang harus diberikan negara untuk membiayai para Narapidana. Untuk menangani over kapasitas di dalam Lapas dibutuhkan kerjasama yang baik antara seluruh instansi penegak hukum. Dibutuhkan perbaikan dalam memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama untuk tindak Pidana ringan agar nantinya tidak dimasukan kedalam Lembaga pemasyarakatan dan dapat di pidana dengan menggunakan hukum acara Pidana biasa. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui pembahasan RUU KUHP yang saat ini sedang di bahas oleh DPR dan pemerintah Indonesia. DPR, melalui komisi III dapat memaksimalkan fungsi pengawasan bagi pengamanan di dalam Lapas.

Kata kunci: Over kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan, Penegak Hukum

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan instansi dari sub sitem peradilan pidana yang mempunyai fungsi yang sangat strategis sebagai pelaksana program pembinaan bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai mana yang telah

diamanatkan di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan” Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Narapidana adalah terpidana yang menjalani Pidana hilang kemerdekaan di dalam Lapas. Lalu untuk Anak Didik Pemasyarakatan adalah (a) anak pidana yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan menjalani pidana di dalam Lapas. Anak paling lama 18 Tahun: (b) anak negara yaitu adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan didalpas anak paling lama sampai berumur 18 Tahun (c) Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 Tahun. Fungsi Lapas ini sesungguhnya sangat berbeda jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem pemenjaraan pada zaman dahulu.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah terjadi kepadatan dimana jumlah penghuni lebih banyak ketimbang jumlah kapasitas yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Kepadatan Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan terjadi karena ada beberapa faktor penyebab.

Dalam menjalankan sistem Pemasyarakatan dibutuhkan Lapas yang berfungsi sebagai tempat Pembinaan bagi Narapidana. Narapidana sendiri adalah manusia yang karena kesalahannya telah melanggar Hukum dan oleh karena perbuatannya itulah Hakim telah menjatuhkan hukuman pada dirinya berupa perampasan hak bergerak yang dimilikinya dan dimasukan kedalam Lembaga Pemasyarakatan

Surat keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan Narapidana/Tahanan, Lapas dalam sistem Pemasyarakatan selain sebagai tempat pelaksanaan Pidana Penjara Lapas juga mempunyai peran untuk melaksanakan pembaguan nasional dalam meningkatkan standart sumber daya manusia di Indonesia, tujuan itu antara lain telah dinyatakan Lapas sebagai tempat pendidikan dan tempat pembangunan sumber daya manusia.

Lapas sebagai tempat Lembaga pendidikan, Lapas mendidik para Narapidana agar nantinya dapat menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berbudi pekerti luhur, mandiri, maju, tangguh, kreatif serta memiliki kompetensi pada bidang pekerjaan yang di jalannya. Sebagai Lembaga pembaguan Lapas bertugas sebagai pembentuk Narapidana agar nantinya dapat menjadi Warga Masyarakat yang produktif, baik selama didalam Lapas maupun nanti ketika mereka sudah bebas.

Namun demikian seiring berjalannya waktu timbul banyak masalah yang mengakibatkan kurang optimalnya program pembinaan yang ada di dalam Lapas. Permasalahan yang paling mendasar adalah adanya kelebihan hunian atau Over Kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang ada hampir di seluruh Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

Yasona H Laoly, hal senada juga dikemukakan oleh Dirjen Pemasyarakatan yaitu Sri Puguh Budi Utami.

Berdasarkan penjelasan Yasona, menyebutkan bahwa tahun 2019 terdapat 150.548 orang Narapidana yang menghuni Lapas di seluruh Indonesia, sementara kapasitas lapas di seluruh Indonesia hanya ada sekitar 120.000 . Jumlah tersebut terlihat bahwa jumlah penghuni Lapas di Indonesia sudah melebihi kapasitas yang sudah ditentukan.

Satu kamar yang seharusnya dapat dihuni 3-4 orang namun karena keadaan terdesak terpaksa satu kamar dipaksa menampung 6-8 orang sekaligus, hal ini sangat memprihatinkan jika dilihat melalui beberapa aspek. Jumlah yang berlebihan tersebut tentu saja memberikan dampak negatif bagi sistem Pembinaan yang ada di suatu Lapas.

Akhir-akhir ini sering kali terjadi kerusakan pada beberapa Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari jumlah Narapidana yang sangat berlebihan yang dapat memicu pengulangan tindak Pidana yang diakibatkan oleh terhambatnya program pembinaan yang ada didalam Lapas baik itu tindak pidana penganiayaan, pembunuhan, perdagangan manusia hingga penggunaan Narkotika.

Dari data diatas jelas bukan lagi menjadi masalah yang biasa-biasa saja melainkan masalah over kapasitas Lapas tersebut harus menjadi pembahasan yang sangat serius. Proses pembinaan yang muaranya adalah sebagai tujuan pemidanaan yang antara lain untuk mereintegrasikan para narapidana tersebut dapat kembali ketengah kehidupan bermasyarakat, serta dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat seperti masyarakat pada umumnya.

Maka sangat diperlukannya upaya-upaya untuk mengurangi jumlah warga binaan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan seperti memberikan pembebasan bersyarat bagi Narapidana yang sudah memenuhi syarat, pemberian Cuti Menjelang Bebas dan pemberian Asimilasi yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Berkaitan dengan hal tersebut maka beberapa aspek yang berkaitan dengan over kapasitas meliputi faktor penyebab, implikasi negatif, serta solusi dalam upaya optimalisasi pembinaan Narapidana yang menjadi penting untuk diperbincangkan sebagai mana tersaji dalam tulisan ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang saya pakai ialah metode penelitian Kajian Pustaka, Kajian Pustaka adalah daftar referensi dari semua referensi seperti buku, jurnal paper, artikel, disertasi, tesis, skripsi, hand proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalamnya. Referensi ditulis menurut abjad huruf awal dari nama akhir atau keluarga penulis pertama dan tahun lahir.

Kajian pustaka dalam penelitian, baik penelitian pustaka maupun penelitian lapangan mempunyai kedudukan yang sangat variabel yang menentukan dalam suatu penelitian. Karena akan menentukan pengetahuan dari segi tujuan dan hasil penelitian. Disamping itu, berfungsi memberikan landasan teoritis tentang mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan dalam kaitannya dengan rangka pengetahuan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghuni Lapas tidak sebanding dengan kapasitas yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Persentasi antara Narapidana yang bebas dengan Narapidana yang masuk kedalam Lapas sangat tidak seimbang. Beberapa kasus tindak pidana yang menimbulkan banyaknya Narapidana baru berkaitan dengan peningkatan yang sangat pesat pada terjadinya tindak pidana khususnya yang terkait dengan tindak Pidana Narkotika, pencurian serta kekerasan terhadap anak.

Selain banyaknya peningkatan terjadinya perbuatan tindak Pidana tersebut diatas, tampak juga beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya peningkatan jumlah Narapidana yang masuk kedalam Lapas yang menimbulkan over kapasitas didalam Lapas. Faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan jumlah Narapidana yang masuk kedalam Lapas bisa juga dari segi hukum. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum pidana materil maupun formil serta hukum pelaksana pidana yang terlalu berorientasi untuk dimasukan kedalam Lapas sehingga seluruh tindak pidana yang dilakukan seseorang baik pidana ringan maupun berat akan dimasukkan kedalam Lapas.

- Efek negatif over kapasitas didalam Lapas bagi program pembinaan bagi para Narapidana.

Over kapasitas cenderung merujuk pada suatu hal yang negatif terhadap yang berkaitan dengan pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Jumlah narapidana yang ada mencapai 150.585 sementara petugas yang ada didalam Lapas hanya 45.000 orang . Over kapasitas juga dapat mengakibatkan kerawanan dibidang keamanan dan ketertiban didalam Lapas, kerawanan berupa kerusuhan, keributan, transaksi narkoba, pelecehan seksual dan kaburnya napi. secara harfiah over kapasitas didalam Lapas dapat menimbulkan prisonisasi . Sykes dengan “points of imprisonment theory” mengatakakan bahwa pada hakekatnya prisonisasi terbentuk sebagai respon terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan segala bentuk perampasan. Penyesuaian disini sebagai meredakan rasa sakit terhadap penderitaan sebagai akibat perampasan pendapat sykes didukung pula oleh pendapat steven box yang mengatakan bahwa pada hakekatnya seorang Narapidana yang baru memasuki area Lembaga pemasyarakatan adalah merupakan bagian dari segitiga. Dalam pandangan pertama adalah organisasi ataupun wakil-wakil resmi yaitu norma-norma petugas. Sudut

pandang yang ke 2 ialah berdirinya kelompok-kelompok narapidana yang menawarkan penyelesaian berbagai macam masalah diantaranya mengatasi suatu perampasan yang merupakan penderitaan .

Dengan demikian adaptasi terhadap kepedihan atau penderitaan yang dilakukan oleh seorang Narapidana hakekatnya karena seseorang Narapidana yang masuk dalam Lapas akan diharapkan pada dua alternatif. Alternatif yang pertama ialah masuk kedalam Lemabag Pemasyarakatan yang akan mengalami perampasan dengan rasa penderitaan yang kuat. Alternatif ke dua adalah masuk kedalam budaya masyarakat narapidana yang berarti mengurangi penderitaan atas perampasan yang dialami.

Berkaitan dengan hal tersebut dikatakan oleh sykes dan messiger bahwa apabila kelompok narapidana banyak menuju keadaan antagonis bersama, maka banyak permasalahan dari kkehidupan penjara menjadi lebih akut. Sebaliknya kembali kalau seseorang aatau sekelompok narapidana bergerak dalam arah yang solidaritas, yang dituntut oleh aturan pidana, rasa askit dipenjara menjadi lebih berkurang. Suatu masyarakat narapidana yang kohesif membawa narapidana kepada suatu kelompok sosial sehingga iya dapat juga mengenal dirinya sendiri dan akan mendukungnya dalam rangka melawan petugas .

Beberapa bentuk prisonisasi adalah perampasan antar sesama narapidana, pencurian, perkelahian kelompok, perpeloncoan khususnya bagi narapidana yang baru masuk, pengelompokan berdasarkan kedaerhan, homo seksual serta kode etik untuk saling melindungi sesama napi . Prisonisasi pda hakekatnya mmiliki dampak yang negatif bagi narapidana yang baru masuk kedam Lapas. Hal tersebut tercermin pada pernyataan berners dan teeters yang menyatakan bahwa penjara atau Lapas telah tumbuh menjadi tempat pencemaran yang pada akhirnya oleh penyokong - penyokong penjara yang dihindari, sebab ditemmpat ini penjahat-penjahat dirusak melalui pengalaman-pengalamannya dengan penjahat kronis.

Berdasa4rkan hal tersebut kongres PBB ke 5 tahun 1975 mengenal “ the prevention of crime and treatment of offenders” dalam satulaporannya menyatakan bahwa pengalaman penjara demikian membahayakannya sehingga dapat merusak ataupun menghalangi secara serius kemampuan sipelanggar untuk memulai lagi untuk mematuhi peraturan setelah ia bebas dari penjara . Dalam keterkaitannya dengan kasus yang berbahaya yang ditimbulkan dalam pidana penjara kongres ke 2 PBB mengenai pencegahan kejahatan dan pelanggar hukum pada tahun 1960 di london berkaitan dengan diterimanya standart minimum rules telah mengeluarkan rekomendasi untuk mengeluarkan penggunaan yang luas dari pidana penjara pendek.

- Solusi untuk mengurangi over kapasitas didalam Lapas.

Beberapa kebijakan terkait dengan mengurangi over kapasitas tampaknya telah dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan pembuatan kamar hunian yang baru mempunyai tujuan utama untuk menambah daya tampung Narapidana. Meski demikian upaya tersebut tampaknya tidak signifikan untuk mengatasi over kapasitas mengingat penambahan jumlah narapidana yang masuk masih jauh lebih banyak ketimbang dengan jumlah napi yang keluar. Apalagi pembanguna Lapas baru membutuhkan waktu yang tidak singkat yaitu membutuhkan waktu tiga tahun dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Salah satu penyelesaian masalah yang dapat dipilih ialah memberikan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Melalui kebijakan- kebijakan tersebutlah dapat mengurangi kepadatan penghuni Lapas. Namun demikian langkah tersebut walaupun disatu sisi dapat mengurangi kepadatan penghuni di dalam Lapas namun dapat menjadi pertanyaan terhadap kualitas manusia yang sudah dibina di Lapas dan juga dari segi keadilan terutama dari pihak korban. Korban yang melihat eks narapidana memperoleh perlakuan yang dapat melukai rasa keadilan .

Sehubungan dengan permasalahan diatas tampaknya diperlukan upaya lain dalam mengatasi masalah over kapasitas narapidana yang ada didalam Lapas. Beberapa tindakan yang bersifat noninstitusional antara lain pidana bersyarat antara lain probation, pidana bersyarat, kompensasi, restitusi dll .dalam perkembangan terkini melalui model restorative justice tampaknya dapat mengurangi populasi Narapidana di dalam Lapas dan aspek keadilan dapat juga tercapai dengan baik.

Pengurangan jumlah Narapidan juga menjadi hal yang sangat harus diperhatikan karena jika tidak diindahkan akan ada pelonjakan jumlah Narapidana yang dapat membahayakan pidana bersyarat nampaknya dapat menjadi angin segar bagi pihak Lapas. Keuntungan yang dapat dicapai ialah pidana bersyarat memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Selain itu pidana bersyarat dan bentuk-bentuk pidana alternatif lainnya yang hampir mirip ialah probation, artinya lain mempunyai keunggulan-keunggulan sebagai berikut: yang pertama ialah, pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada Narapidana untuk dapat memperbaiki dirinya di tengah-tengah masyarakat, sepanjang kesejahteraan Narapidana dalam hal ini dipertimbangkan sebagai hal yang lebih diutamakan daripada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, jikalau seandainya si terpidana dilepas ditengah_tengah masyarakat. Dalam hal ini hal yang paling utama adalah kesehatan mental dari si terpidana. Keuntungan yang kedua ialah bahwa pidana bersyarat memungkinkan untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sebagai manusia, yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Keuntungan yang ketiga ialah bahwa pidana bersyarat akan mencegah

timbulnya stigma negatif bagi para mantan Narapidana, menurut Richard D Schwartz dan Jerome H. Skolnick disebut sebagai salah satu konsekuensi diluar hukum yang harus di perhitungkan didalam kebijaksanaan para penegak hukum. Stigma ini sering kali dirasakan oleh para keluarga mantan Narapidana.

Selain probation ada pula penjatuhann pidana alternatif lain yang dapat dijadikan solusi pengurangan tingkat over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, yakni ialah, restitusi, dalam hal ini dalam hal perspektif victimologi . pada hakekatnya restitusi berkaitan dengan perbaikan atas kerugian fisik, moral , maupun harta benda, kedudukan dan hak-hak korban atas perlakuan yang dilakukan oleh sang pelaku kepada korban. Restitusi adalah merupakan suatu tindakan restitusif terhadap pelaku tindak pidana yang berkarakter pidana dan menggambarkan suatu tujuan koreksional dalam kasus pidana. Restitusi dalam kaitannya dengan penanganan over kapasitas didalam Lapas mempunyai manfaat apabila diintegrasikan dengan lembaga pidana bersyarat, yang berimplikasikan mengurangi populasi hunian Lapas sekaligus penghematan anggaran pengeluaran pemerintah. Dengan tidak dipelaku kedalam Lapas maka akan menghemat biaya yang harus dilakukan oleh Lapas, yang seharusnya anggaran tersebut di alokasikan untuk biaya makan dan keperluan lain Narapidana.

Selanjutnya ialah pengembangan model penyelesaian kasus pidana yang bermanfaat untuk mengurangi jumlah Narapidana yang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan dengan penyelesaian secara kekeluargaan antara pelaku dengan korban. Dalam hal ini si pelaku tidak dimasukan kedalam Lapas apabila proses perdamaian dapat tercapai. Keuntungan dari restorative justice ialah antara lain sebagai sarana untuk mengurangi jumlah Narapidana didalam Lapas, juga lebih mendorong terciptanya reintegrasi sosial pelaku tindak pidana kedalam kehidupan masyarakat serta mengurangi terjadinya stigma.

Berdasarkan tulisan diatas maka untuk dapat mengurangi jumlah Narapidana yang makin lama terlalu banyak sehingga mengakibatkan over kapasitas yang cenderung berimplikasikan negatif pada tujuan Pemidanaan antara lain terjadinya prisonisasi dan rawannya sistem keamanan maka, penyelesaian perkara pidana perlu menggunakan pendekatan yang baru yakni pemidanaan alternatif selain pidana perampasan hak bebas.

Kesimpulan

Kesimpulan dari tulisan ini mengenai penanggulangan membludaknya jumlah narapidana didalam lapas dapat disimpulkan bahwa over kapasitas terjadi akibat laju pertumbuhan penghuni lapas tidak sesuai dengan laju pengeluaran narapidana yang sudah bebas dari lapas, selain itu juga jumlah penghuni lapas yang juga tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang tersedia didalam lapas. Selain itu juga ada beberapa faktor pendorong semakin banyaknya jumlah narapidana yang masuk kedalam lapas yaitu dari faktor hukum yang memiliki

paradigma yang cenderung berorientasi kepada penghukuman pemenjaraan, kondisi tersebut mengakibatkan semakin banyaknya narapidana yang masuk kedalam lembaga pemasyarakatan. Over kapasitas juga berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pengamanan terhadap narapidana yang diakibatkan oleh kurangnya perbandingan antara jumlah petugas dengan jumlah narapidana di dalam lapas, kondisi tersebut mengakibatkan sulitnya menjalankan program pembinaan yang sesuai dengan SOP yang berlaku.

batkan sulitnya menjalankan program pembinaan yang sesuai dengan SOP yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa. 2015. Prisonisasi dan permasalahannya terhadap pembinaan Narapidana. Undip.
- Atasasmita, romli. 2012. Kepenjaraan dalam saru bunga rampai. Bandung: armico
- Baners and Teeters. 2014. New Horizon in Criminology. Second editionn. New delhi: pretince hall of india
- Box, steven. 1981. Deviance, reality and society second edition. Holt. Richert and winston. New york : sudney toronto
- Hood, Roger and Richard Sparks. 2017. Key Issues in criminology. London: World University Library
- Soeprapto. 2015. Makasar . Pembinaan Bagi Terpidana Di Dalam Lapas
- Sutarjo. 2008. Jakarta . Penyelesaian Meningkatnya Jumlah Terpidana di Dalam Lapas. Skripsi. Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta
- Schwartz, Richard D. And Jerome H. Skolnick, 1975. The stigma of “ex con “ and the problem of reintegration. New jersey: prentice hall Inc. Engglewood cliffs.